

**PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME DALAM PERSPEKTIF MODAL SOSIAL
MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

**Oleh: Dr. I Made Suarta, S.H.,M,Hum
Dosen FPBS IKIP PGRI Bali**

ABSTRAK

Multikulturalisme merupakan wujud keanekaragaman budaya yang terjadi dalam masyarakat. Nenek moyang masyarakat Indonesia sangat menyadari dan telah mengenal nilai-nilai luhur berupa karakter moral yang adiluhung. Hal tersebut dapat secara nyata tercermin dari nilai ketimuran yang dapat dibanggakan. Adanya ajaran Gotong royong yaitu pola perilaku dalam mewujudkan suatu tujuan yang dikerjakan secara bahu membahu, saling menghargai, mendahului kepentingan bersama dan kebersamaan dari berbagai kompetensi/profesi. Slogan Bhineka Tunggal Ika yaitu yang berbeda untuk mencapai tujuan yang tunggal. Kemudian betapa pentingnya pendidikan multikulturalisme dilaksanakan di negeri tercinta ini untuk meraih pendidikan yang meng-Indonesia.

Multikulturalisme meliputi 11 aspek yaitu: (1) ras, (2) gender, (3) orientasi seksual, (4) status sosial ekonomi, (5) usia, (6) status pernikahan, (7) letak geografis/asal-usul, (8) pilihan agama, (9) etnisitas, (10) *disability/ability*, (11) kultur/budaya. Pengaruh kebudayaan local dan global dalam MEA akan dapat lebih dimanfaatkan sebagai pelezat dalam persepektif modal sosial dan bahkan dapat dijadikan pengembangan berbagai modal berikutnya, seperti; modal budaya, modal keyakinan, serta modal ekonomi.

Berbagai modal tersebut akan dapat memperkaya Kebudayaan Nasional yang berlandaskan Pancasila dari perwujudan cipta, rasa, dan karya bangsa Indonesia, kemudian manusia Indonesia berupaya untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsanya, serta mengarahkan dan memberikan wawasan serta makna pada pembangunan nasional menuju MEA. Kekayaan terhebat yang ada di Indonesia yaitu beragamnya suku bangsa, diantaranya; suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy, suku Bali, suku Sasak, suku Batak, suku Dayak, dan sebagainya. Keragaman suku ini, tentunya dapat menciptakan budaya yang beragam pula serta memperkaya bangsanya. Oleh karena itu, multikulturalisme dalam interaksi social di kalangan masyarakatnya akan menjadi support baru bagi pendidikan dalam MEA.

Pendahuluan

Globalisasi merupakan kekuatan yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat baik di tatanan local maupun global. Dampak globalisasi terhadap keberadaan budaya local atau budaya etnik ditanggapi secara beragam. Yang pertama menganggap bahwa globalisasi akan menyebabkan homogenisasi dan menghilangkan budaya local. Kedua, globalisasi memunculkan hibridisasi budaya antara budaya local dan budaya global. Ketiga, globalisasi menimbulkan konflik budaya. Kehilangan identitas atau konflik budaya demi mempertahankan identitas budaya dalam menghadapi ekonomi dan budaya global bukanlah pilihan yang bijak. Dialog antar budaya dalam masyarakat global merupakan sebuah keniscayaan. Hibridisasi budaya merupakan fenomena global yang terjadi dalam perilaku mobilitas di berbagai kawasan Indonesia.

Mobilitas ini juga akan mempengaruhi berbagai bentuk reorganisasi sosial, ekonomi dan politik. Hal tersebut, akan dominan berdampak pada reorganisasi ekonomi yaitu perwujudan dari usaha mencari hidup yang lebih baik secara ekonomi, dan merupakan ketimpangan ekonomi regional dan nasional. Selanjutnya, pada level yang lebih mikro untuk di Indonesia, yaitu gerakan orang terjadi meluas akibat dari transportasi dan media sosial yang semakin hari semakin baik dan hampir setiap tempat akan terdiri dari kaum pendatang yang sifatnya sesaat maupun permanen. Appadurai menyatakan bahwa gerakan manusia semacam itu merupakan tanda perkembangan yang paling penting dalam rekonstruksi sejarah kehidupan (Abdullah, 2010:117).

Kemudian, permasalahan sosial dalam globalisasi akan hadir untuk memberikan harapan dan tantangan bagi pembangunan pendidikan di Indonesia. Kehadiran globalisasi dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) bagi Indonesia yang menyadarkan bahwa betapa pentingnya *capital sosial* (modal sosial). Modal sosial merupakan energy kolektif masyarakat yang berupa kebersamaan, solidaritas, kerjasama, toleransi, kepercayaan dan tanggung jawab tiap anggota masyarakat memainkan setiap peran dan amahnya (Sudrajat, 2008:1).

Potret diatas sangat jeals memperlmasalahkan globalisasi sebagai multikulturalisme yang sangat menghantui masyarakat Indonesia salam menyongsong MEA. Oleh karena itu, pemakalah berkeinginan menawarkan dua pertanyaan dalam paper ini, yaitu: (1) apakah pendidikan multukulturalisme itu? (2) bagaimana pendidikan mulkutulasime dalam perspektif modal sosial menuju MEA?

Pembahasan

1. Pendidikan Mulkturalisme

Akar kata mulkturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, multukukturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya degan kebudayaan masing-masing yang unik.

Menurut pandangan Pedersen (Glading: 2012), budaya dapat didefinisikan dengan beberapa cara yaitudefinisi meliputi variabel etnografik seperti etnis, kewarganegaraan, agama, dan Bahasa. Sedangkan varianel demografik meliputi umur, gender, tempat tinggal, dan sebagainya. Jika dilihat dari variabel status meliputi latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan dan keanggotaan formal atau informal dalam cakupan luas. Budaya akan membentuk perilaku manusia baik adar maupun tak sadar mengenai pemikiran, persepsi, nilai, tujuan, moral dan proses kognitif.

Banks (1993:3) mendefenisikan pendidikan multicultural sebagai pendidikan untuk *people of color* yang dapat diartikan bahwa pendidikan multicultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan. Kemudian diperlukan siasat tentangmenyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleransi dan semangat egaliter. Hilda (dalam Sitti Mania, 2010:80) mengartikan pendidikan multicultural sebagai perspektif yangmengakui realitas politik, social, dan ekonomi yang dialami masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status social ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan.

Pendidikan multicultural dapat dikatakan merupakan suatu bentuk pendidikan yang menerapkan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada peserta didik seperti keragaman etnis, budaya, Bahasa. Agama, status social, gender, kemampuan, umur, dan ras, dan yang paling penting adalah meningkatkan tujuan kesadaran peserta didik agar selalu berperilaku humanis, pluraris, dan demokratis.

Pendidikan multicultural dapat digunalan baik pada tingkat deskriptif dan normayive yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multicultural. Hal tersebut mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multicultural. Dalam konsteks deskriptif hendaknya kurikulum pendidikan multicultural mencakup subjek-subjek seperti toleransi, tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokratis dan pluraritas, kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan (Sitti Mania, 2010:81).

Kemudian dalam konteks teoritis belajar dari model-model pendidikan multicultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju yang dikenal dengan lima pendekatan, yaitu: pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Kedua, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Ketiga, pendidikan bagi pluralism kebudayaan. Keempat, pendidikan dwi-budaya. Kelima, pendidikan multicultural sebagai pengalaman moral manusia. Dalam konteks sejarah, pendidikan multicultural sebagai sebuah konsep atau pemikiran tidak muncul dalam ruangan yang kosong, namun ada interes politik, sosial, ekonomi dan mendorong kemunculannya (La Belle & Chistoper Ward, 1994:44).

Uraian diatas mengenai pendidikan multicultural dapat ditarik benang merahnya yang menggambarkan tentang kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya. Dengan demikian pendidikan multicultural dapat teridentifikasi dalam perkembangan sikap seseorang yang kaitannya dengan kebudayaan-kebudayaan lain dalam masyarakat local sampai dengan masyarakat dunia.

2. Pendidikan multiculturalisme dalam perspektif modal sosial menuju MEA

Yani (2008) menyatakan bahwa pada akhirnya tahun 2015 telah disepakati babak awal memasuki MEA. Negara-negara anggota ASEAN telah meratifikasi Piagam ASEAN pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand tahun 2008. Tiga pilar *ASEAN Community* yang meliputi *ASEAN Economic Community*, *ASEAN Security Community*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community* akan segera diimplementasikan. *ASEAN Socio-Cultural*

Community Blueprint (ASCCB) dimaksudkan untuk membawa ASEAN lebih dekat dengan masyarakatnya, lebih melibatkan masyarakat negara-negara anggota dalam berbagai program kegiatan ASEAN sehingga pada masa mendatang ASEAN bukan lagi hanya didominasi oleh kalangan pejabat pemerintah dan diplomat.

MEA berfokus pada Asia Tenggara sebagai kesatuan pasar dan produksi; MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi; MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan prioritas UKM; MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Kebudayaanannya tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia dan setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Definisi kebudayaan nasional menurut TAP MPR No. II tahun 1998, yakni Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, rasa dan karsabangsa Indonesia dan merupakan keskeluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berbudaya sampai saat ini terdapat lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010 (Wikipedia, 2010).

Saat ini Indonesia sedang berfokus menyiapkan masyarakatnya untuk masuk dalam kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mengingat keragaman budaya dari berbagai negara yang akan semakin mempermudah akses mobilitas warganya, maka Indonesia perlu mempersiapkan diri dalam mencetak generasi yang siap berkompeten secara global dipasar Internasional. Beragam profesi pun mempunyai peran yang cukup penting dalam mendukung dan mengupayakan kualitas bangsa Indonesia di mata dunia. Pendidikan multikulturalisme yang hendaknya merupakan materi wajib pada pendidikan Nasional Bangsa Indonesia, mempunyai peran yang sama pentingnya dalam mencetak dan menciptakan insan (peserta didik) yang berkompeten. Kualitas dan kompetensi yang diharapkan dapat dibentuk dalam rangka memasuki MEA antara lain: unggul, cerdas, kreatif, mandiri, bersemangat, memiliki jiwa *entrepreneur*, siap berkompetensi, serta berdaya saing tinggi.

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Indonesia dan Sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyetujui perjanjian (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)*. MEA adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan (Rahayu, 2014).

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights (IPR)*, *taxation*, dan *E-Commerce*. Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pasar Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. Keempat, MEA dapat diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan membangun sistem untuk meningkatkan koordinasi koordinasi terhadap negara-negara anggota.

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri atas beragam suku bangsa, diantaranya suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy, suku Bali, suku Sasak, suku Batak, suku Dayak, dan sebagainya. Keragaman suku ini, tentunya dapat menciptakan budaya yang beragam. Oleh karena itu, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam salah satu suku bangsa tersebut dapat dinamakan budaya tradisi atau budaya local. Selanjutnya budaya local merupakan sebuah hasil cipta, rasa, karsa atau buah budi yang tumbuh dan berkembang pada alam serta masyarakatnya. Oleh karena itu, referensi budaya local berupa vibrasi alam material/releginya. Hal tersebut diperkuat bukan untuk meredam pengaruh kebudayaan global, bahkan lebih dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai pelezat dan berbagai modal pengembangan.

Di sisi lain, bahwa budaya local merupakan salah satu benteng tangguh menghadapi serbuan budaya global yang berpotensi melenyapkan identitas bangsa. Selanjutnya, budaya local memiliki kearifan yang berupa nilai, perilaku atau ekspresi dan bentuk-bentuk hasil kebudayaan (karya) yang bersifat material dan immaterial. Budaya nilai memberikan sistem pengetahuan, budaya perilaku memberikan semesta pengalaman nyata, dan budaya karya memberikan warisan budaya (heritage) kepada yang tidak terlepas dari tradisi adat berupa upacara adat. Upacara adat merupakan salah satu produk budaya local. Hal ini memiliki beberapa fungsi mendasar, yakni ritus komunikasi (manusia dengan Tuhan), perekat sosial (solidaritas maker), penguatan atas nilai-nilai tradisi, wahana ekspresi kolektif dan wahana pengembangan nilai-nilai ekonomi terkait dengan budaya wisata. (<http://ikhsancrut.ngeblogs.combudaya-lokal/diunduh tanggal 1 Maret 2015>).

Ki Hajar Dewantara (1994:54) menyatakan bahwa kebudayaan itu berarti buah budi manusia atau merupakan kemenangan hidup manusia. Budi merupakan jiwa yang masak, cerdas, sanggup dan mampu mencipta sehingga budi manusia meliputi gerak-gerik pikiran, rasa, kemauan sehingga kebudayaan itu dapat dibagi menjadi: (1) buah pikiran berupa ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengajaran, filsafat; (2) buah perasaan berupa segala sifat keindahan dan keluhuran batin, kesenian, adat istiadat, kenegaraan, keadilan, ekagamaan, kesosialan, dan sebagainya; (3) buah kemauan berupa semua sifat perbuatan dan buatan manusia seperti industri, pertanian, perkapalan, bangun-bangunan, dan lain-lain. Kemudian rendah tingginya kebudayaan itu menunjukkan rendah tingginya budi serta peradaban dalam hidupnya sesuatu bangsa, dengan kata lain bahwa kebudayaan memiliki sifat utuhnya atau globalnya hidup suatu bangsa serta memiliki sifat nasional. Hal ini kebudayaan itu muncul karena manusia (rakyat) dan tidak terlepas dari lingkungan alam serta lingkungan jaman yang dimaknai bahwa perkataan alam dan jaman boleh juga disebut kodrat dan masyarakat. Kodrat adalah kekuatan alam dan masyarakat mewujudkan jaman.

Gagasan multicultural pada awalnya muncul dan berkembang di negara-negara yang berpenduduk majemuk, baik dari segi etnis, agama, latar belakang ekonomi dan sosial, gender, usia, gaya dan orientasi hidup, dan lain-lain. Kemajemukan ini melahirkan suatu keyakinan akan nilai-nilai persamaan hak di antara berbagai perbedaan. Menurut Sue & Sue (2003), konsep multicultural meliputi 11 aspek yaitu: (1) ras, (2) gender, (3) orientasi seksual, (4) status sosial ekonomi, (5) usia, (6) status perkawinan, (7) letak geografik/ asal usul, (8) pilihan agama, (9) etnisitas, (10) disability/ability, (11) kultur/ budaya. Melengkapi kajian tentang multicultural ini Hogan-Garcia (2003), mengkaji secara khusus aspek culture (kultur/budaya) yang meliputi 12 unsur yaitu: (1) sejarah, (2) faktor status sosial, (3) pola-pola interaksi kelompok sosial, (4) orientasi nilai, (5) Bahasa dan komunikasi: Verbal dan nonverbal, (6) proses hidup keluarga, (7) keyakinan dan praktek praktis penyembuhan, (8) agama, (9) seni dan bentuk ekspresinya, (10) Diet/ makanan, (11) rekreasi, (12) pakaian.

Pandangan Sue & Sue (2003) menyatakan bahwa *consepton of culture* (konsep kultur) sebagai suatu fenomena gunung es, dimana ada unsur-unsur kultur yang diketahui atau nampak secara sadar dan ada unsur-unsur kultur yang tidak diketahui secara sadar. Unsur-unsur kultur yang diketahui atau nampak secara sadar meliputi: (1) literature, (2) sikap/perilaku/yatakrama, (3) adat istiadat/ kebiasaan, (4) Bahasa, (5) sejarah, (6) cerita rakyat/ dongeng. Sementara unsur-unsur kultur yang tidak diketahui atau nampak secara sadar meliputi: cara atau gaya komunikasi, ekspetasi peran, komunikasi nonverbal, tata tertib prioritas, pola-pola relasi interpersonal, cara/ gaya bekerja dan belajar, pendekatan-pendekatan dalam pemberian tugas, bagaimana tugas-tugas disimbolkan, apa motivasi orang, sikap mengandung pesan, sikap mengandung komitmen, perhatian pada efisiensi, dalam merencanakan sesuatu, cara membangun relasi atau hubungan, cara/ gaya bernegosiasi, sikap yang menunjukkan otoritas, waktu-waktu kerja, langkah dalam mana individu bergerak dari formal ke informal, dan persepsi tentang profesionalisme.

Kemudian, Wahyono menyatakan bahwa dimensi multicultural ini mengandung makna suatu penghormatan terhadap keagamaan budaya (pluralisme) sehingga tidak ada dominasi budaya terhadap budaya lain. Dimensi terdalam multicultural memberikan pengakuan atas berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap-tiap kelompok etnis, ras, agama, dan entitas kebudayaan. Berkaitan dengan itu, Darmanintyas (2006) menyatakan pula bahwa dimensi multicultural lebih dari sekedar pengakuan atas keragaman tetapi membuka ruang untuk akses dan berekspresi bagi semua elemen keanekaragaman dengan bersandar pada jati diri masing-masing dan kemudian saling berkomunikasi tanpa harus ada yang tereleminasi. Kata kunci dalam memahami multicultural adalah adanya pengakuan hak-hak minoritas di dalam kehidupan bersama.

Masyarakat sekolah perlu disadari sebagai salah satu sentral dari pembentukan karakter yang berbasis kesadaran multicultural, dikarenakan masyarakat sekolah merupakan pencetak dan pembentuk individu yang nantinya merupakan penyusun dari suatu masyarakat melalui proses pendidikan. Menurut

Saha (1997) menyatakan bahwa pendidikan multicultural dapat dipahami sebagai proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih dari satu budaya/adat, yang ditunjukkan melalui kebangsaan, Bahasa, etnik, atau kriteria rasial. Pendidikan multicultural dapat berlangsung dalam setting pendidikan forma; atau informal, langsung atau tidak langsung. Pendidikan multicultural diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, persamaan antar budaya, serta kaitannya dengan pandangan terhadap dunia, konsep nilai.

Multicultural merupakan wujud keanekaragaman budaya yang terjadi dalam masyarakat Indonesia telah disadari dan dikenal sejak nenek moyang. Nilai-nilai luhur telah menjadi karakter diantara anggota masyarakat. Hal ini dapat secara nyata tercermin dari nilai ketimuran yang dapat dibanggakan. Adanya ajaran gotong royong yaitu pola perilaku dalam mewujudkan suatu tujuan yang dikerjakan secara bahu membahu, saling menghargai, mendahului kepentingan bersama dan kebersamaan dari berbagai kompetensi/ profesi. Slogan Bhineka Tunggal Ika yaitu yang berbeda itu untuk mencapai tujuan yang tunggal. Kemudian betapa pentingnya pendidikan multikulturalisme dilaksanakan di negeri tercinta ini untuk meraih pendidikan yang meng-Indonesia.

Pendidikan di Indonesia haruslah peka menghadapi arus perputaran globalisasi, gelombang Hak Asasi menuntuk pengakuan akan keselarasan yang ada dalam perbedaan suku, ras, dan agama. Pendidikan multicultural mutlak diperlukan dengan berdasarkan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakatnya. Pendidikan multicultural diyakini mampu menjaga tatanan kehidupan masyarakat, menumbuhkan tata nilai, memupuk persahabatan, mengembangkan sikap saling memahami.

Pemerintah pusat melalui otonomi pendidikannya mendukung upaya yang mengedepankan kepentingan dan keberagaman local. Pendidikan yang mengedepankan isu keberagaman dalam masyarakat menjadi inti dari pendidikan multikultur. Pendidikan multikultur lebih mementingkan moral/ karakter dibandingkan pendidikan birokratis yang lebih berorientasi pada tampilan kecerdasan pikiran. Kesadaran nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan karakter akan menjadi hal penting dalam pendidikan multicultural. Memahami keberadaan manusia perlu disadari bahwa manusia munculnya monokulturalisme yang terjadi perlu dihargai. Disisi lain, Tantangan bagi pendidikan justru munculnya monokulturalisme yang terjadi di era-era sebelumnya yaitu adanya kurikulum nasional, dan standarisasi ujian secara nasional.

Banks (dalam Christopher, 2010) menjelaskan bahwa pendidikan multicultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu: Pertama, content integration yang dapat diartikan mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep dasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Kedua, the knowledge construction proses yang dapat diartikan membawa peserta didik untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin). Ketiga, an equity pedagogy yang dapat diartikan menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar peserta didik dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik peserta didik yang beragam baik dari segi ras, budaya (*culture*) ataupun sosial. Keempat, prejudice reduction yang dapat diartikan dalam mengindentifikasi karakteristik ras peserta didik dan menentukan metode pembelajaran mereka.

Pendidikan multicultural di Indonesia perlu memaknai sebagai kombinasi dari tiga mencakup tiga jenis transformasi yaitu: (1) transformasi diri; (2) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar dan; (3) transformasi masyarakat (Mahfud, 2009: 200-201). Wacana pendidikan multicultural akan terus berkembang seperti bola salju (snow ball) yang semakin besar akan diperbincangkan. Wacana pendidikan multicultural akan dapat diberlakukan dalam dunia pendidikan di Indonesia terwujud dalam kurikulum, materi dan metode.

Urgensi pendidikan multicultural di Indonesia adalah: Pertama, pendidikan multicultural sebagai sarana alternatif pemecahan konflik yaitu spectrum masyarakat Indonesia yang beragam menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia guna mengolah pendapat tersebut menjadi suatu asset, bukan sumber perpecahan. Pendidikan multicultural memiliki dua tanggung jawab besar yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi, dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri berbagai macam budaya. Kedua, supaya siswa tidak tercerabut dari akar budaya, yaitu dalam era globalisasi ini, pertemuan antar budaya menjadi ancaman serius bagi peserta didik. Untuk menyikapi realitas global tersebut, peserta didik hendaknya diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek pengetahuan. Ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional, yaitu dalam melakukan pengembangan kurikulum sebagai titik tolak dalam proses belajar mengajar, atau guna memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa dengan ukuran atau tingkatan tertentu, pendidikan multicultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting (Mahfud, 2009: 216:222). Keempat, menuju masyarakat Indonesia yang multicultural yaitu acuan

utama bagi terwujudnya masyarakat Indoensia yang multicultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideology yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Model multikulturalisme ini adalah sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana terungkap dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: “kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak kebudayaan didaerah” (Mahfus, 2009: 235:236).

Selanjutnya, menurut Ajaran Gorongn Royong, Ajaran Bhineka Tunggal Ika, dan pendapat para tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa jaman akan ditentukan oleh masyarakat dan pendapat Bennet (dalam Azra, 2001) menyatakan salah satunya berorientasi social (Socially-oriented programs). Oleh karena itu, interaksi social dikalangan masyarakat ASEAAAN yang diperloeh dari pengetahuan dalam suatu tindakan yang etrcipta diklanagan masyarakat ASEAN yang diperoleh dari pengetahuan dalam suatu tindakan yang tercipta dari MEA akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya sebagai modal dalam tatanan multikulturalisme. Berkaitan dengan modal untuk memenuhi kebutuhannya merupakan individu kreatif bukanlah individu egois yang hanya mementingkan dirinya dan mengorbankan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini merupakan tindakan cerdayang bersifat rasional (objektif) dan irrasional (subjektif) dalam tindakan sebagai individu kreatif, individu sosial dan individu religius dalam konsep “*Megae pang pade idup*” yaitu menguntungkan sesame yang membahagiakan. Hal tersebut dapat menjadikan perspektif modal social untuk menjadikan pendidikan multicultural yang meng-Indonesia dalam menuju masa depan bangsa.

Ungkapan dari dimensi individu religius merupakan potensi individu yang dilandasi oleh pilihan yang paling tepat/ pantas dan saling menguntungkan/seimbang dalam keharmonisan yang membahagiakan merupakan relasi yang oelh praktik sosial dengan persamaan (Habistus x Modal) + Ranah = Praktik (Fashri, 2007:96). Selanjutnya, dengan terjadinya relasi yang saling menguntungkan/ keseimbangan sebagai habitus, dan tersedianya media MEA serta modal berupa modal sosial maka terjadi Praktik social.

Penutup

Penutupan multikulturalisme memiliki peran penting salam mempersiapkan generasi muda menghadapi MEA. Tantangan kehidupan MEA ada dalam multikulturalisme akan tidak terlepas dari permasalahan sosial sehingga dibutuhkan praktik sosial yang tidak terlepas dari perpsektif modal sosial dan terjadinya field/ ranah atau MEA itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2010). Konstruksi dan reproduksi kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset.
- Atmaja, B.N. (1999). Era Multibudaya: Peluang dan Ancaman bagi eksistensi Idesa adat di Bali. Edisi Puputan. Widya Satya Dharma. Denpasar: Offset Bali Post. Jurnal Vol 6 No. 2. 17-34.
- Azra, A. (211). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru. Jakarta: Penerbit Kalimah.
- Banks, J.A. (2007). Educating citizens in a multicultural society. Second edition. New York: Teacher Collegde Press.
- Darmaningyas. (2006). Quo Vadis Pendidikan Multikultural di Indonesia. Dalam Y. Sari
- Dewantara, K.H. (1994). Kebudayaan: Bagian II (cetakan kedua). Yogyakarta: Percetakan offset Tamansiswa.
- Fashri, F. (2007). Penyingkapan kuasa simbil-apropriasi refleksi pemikiran Pierre Bourdieu. Yogyakarta: Juxtapose.
- Jatmiko & A. Ferry T. Indratno (Peny). 2006): 91-100) Pendidikan Multikultural yang Berkeadilan Sosial. Yogyakarta: dinamika Edukasi Dasar (DED) & Misereor/KZE.
- La Belle, T.J & C.E. Renner (1994: 44). Multicultural methodologies in second language acquisition: Integreting Global Responsibility, peace education and cross cultural awerness, <http://www.midtesol.org/articles/peediti.htm>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2014.
- Mahfud, C. (2006). Pendidikan Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mania, Sitti. (2010). Lentera Pendidikan: Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran. Jurnal Vol. 13. No. 1 Juni 2010.
- Rahayu. (2014) Pengertian dan Karakteristik Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). (tersedia: <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/08/Pengertian-karakteristik-masyarakat-ekonomi-asean.html>), diakses tanggal 12 Maret 2015.
- Saha, J.L. 1997. Educational and National Development: a Comparative Perspective. New

- Sue. D.W & Sue. D. 2003. Counseling The Culturally Diverse. Theory and Practice (4th.Ed). USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Yani, Yanyan Mochamad. (2008). PIAHAM ASEAN, ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY (ASCC) BLUPRINT DAN INDONESIA, artikel Seminar Nasional "Sosialisasi ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint", Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Bandung, 20 Nopember 2008.